

Strategi Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan Dalam Upaya Penguatan Sistem Kelembagaan Adat Suku Kuri di Kampung Sarbe Teluk Bintuni

Strategy For Management Of Fisheries Resources in Efforts To Strengthen Institutional Systems Traditional Course Tribe in the Sarbe KampungBintuni Bay

Oleh:

Deybi Hamjati¹, Ahmad Fahrizal^{2*}, Abu Darda Razak³, Irwanto⁴

¹Universitas Muhammadiyah Sorong (Ums)

²Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan UM Sorong

³Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

⁴WWF Indonesia

e-mail correspondence: a.fahrizal.ab@gmail.com

Abstrak

Potensi sumber daya alam di wilayah pesisir Teluk Bintuni memiliki kekayaan alam berlimpah terutama hutan mangrove dan biota perairan yang bernilai ekonomi tinggi yaitu udang jerbung (*Penaeidae*), kepiting bakau (*Scylla sp*) dan kakap (*Scianidae*), Penelitian ini bertujuan mengetahui cara perizinan usaha penangkapan kepiting bakau (*Scylla sp*) di Kampung Sarbe dan mengetahui langkah-langkah strategi yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan dalam penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe. Metode yang digunakan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), analisa data yang digunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan komoditas hasil tangkapan utama nelayan Kampung Sarbe adalah kepiting bakau yang dalam Pemanfaatan diatur dan dikelola oleh lembaga masyarakat adat. Strategi pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe Teluk Bintuni yaitu : pengembangan wilayah pesisir dan laut Teluk Bintuni sebagai kawasan perlindungan dan pelestarian yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian potensi sumberdaya laut di wilayah Kampung Sarbe, perlindungan ekosistem mangrove dan pengelolaan potensi sumberdaya perikanan secara lesatari, mendorong terciptanya sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan.

Kata kunci: Kelembagaan adat, sumberdaya perikanan, strategi pengelolaan

Abstrack

The potential of natural resources in the coastal area of Bintuni Bay has abundant natural resources, especially mangrove forests and aquatic biota with high economic value, namely jerbung shrimp (Penaeidae), mangrove crabs (Scylla sp) and snapper (Scianidae). mangrove crabs (Scylla sp) in Sarbe village and know the strategic steps that support the management of fisheries resources in strengthening the traditional Kuri tribal institutional system in Sarbe village. The method used observation, interviews and Focus Group Discussion (FGD), data analysis used SWOT analysis. The results showed that the main catch commodity of Sarbe village fishermen was mangrove crabs which in Utilization were regulated and managed by indigenous community institutions. Strategies for managing fisheries resource potential in an effort to strengthen the Kuri tribal custom institutional system in Sarbe Bay in Bintuni Bay, namely: developing the coastal and marine area of Bintuni Bay as a protection and conservation area managed by the Customary Law Community to increase capacity and public awareness of the preservation of the potential of marine resources in the region Sarbe Village, protection of mangrove ecosystems and the management of fisheries resources in a lesatari manner, encourage the creation of facilities and infrastructure for marketing fishery products.

Keywords: Customary institutions, fisheries resources, management strategie

PENDAHULUAN

Potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir Teluk Bintuni memiliki kekayaan alam berlimpah terutama hutan mangrove dan biota perairan yang bernilai ekonomi tinggi. Teluk Bintuni dikelilingi hutan mangrove seluas 225.367 ha dengan kerusakan mangrove mencapai 8.553 ha (Hendrik, 2011). Hutan mangrove banyak memiliki fungsiantara lain, melindungi lingkungan dari pengaruh oseanografi (pasang-surut, arus, angin topan, dan gelombang), mengendalikan abrasi, dan mencegah intrusi air laut ke darat, sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), dan daerah pemijahan (*spawning ground*) dari beberapa jenis ikan, udang, sebagai sumber kayu, bahan kertas, dan arang (Saru, 2014).

Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir harus terus dijaga dan dilestarikan agar tidak menyebabkan kerusakan sumberdaya perikanan. Salah satu konsep pemanfaatan tradisional yang ada yaitu sasi di kawasan konservasi perairan Kepulauan Maluku (Kusumadinata, 2015). Sasi ditetapkan bertujuan agar masyarakat dapat mengelola sumberdaya perikanan secara bijaksana dan membagi hasilnya dengan adil sesuai dengan peraturan yang telah dibuat serta menjaga keseimbangan sumberdaya alam, yang melanggar peraturan sasi akan memperoleh sanksi secara spiritual dan sanksi masyarakat (Damardjati dan Kusrini, 2015). Potensi sumberdaya alam hutan mangrove Kabupaten Teluk Bintuni banyak memberikan manfaat bagi keberadaan biota bernilai ekonomi penting, tiga jenis komoditas utama perikanan yakni udang jerbung (*Penaeidae*), kepiting bakau (*Scylla sp*) dan kakap (*Scianidae*) (USAID SEA PROJECT, 2017).

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, dengan adanya pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, dapat membantu masyarakat menjaga keberlanjutan dari sumberdaya perikanan (Lestari dan Satria, 2015).

Pengelolaan sumberdaya perikanan memberikan wewenang, tanggung jawab dan kesempatan pada masyarakat melalui pola pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat, untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat terhadap lingkungan sumberdaya perikanan. Selain itu dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) berperan dalam mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan ketentuan peraturan

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No 1 tahun 2019 pasal 11 angka 4 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah strategi yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan dalam penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan mulai dari 18 Agustus sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 berlokasi di Kampung Sarbe Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.



(Sumber : BPS Teluk Bintuni, 2019.

Gambar 1. Lokasi penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian disajikan pada (Tabel.1)

Tabel. 1. Alat dan bahan

No	Alat dan Bahan	Fungsi
1	Alat tulis	Mencatat hasil penelitian
2	Perekam (<i>recorder</i>)	Merekam hasil wawancara
3	List wawancara	Petunjuk/ acuan saat melakukan wawancara
4	Kamera	Mengambil gambar saat penelitian
5	Papan pengalas	Mengalaskuesioner

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi dan wawancara secara langsung dengan informan dengan menggunakan kuesioner pada lokasi penelitian dan diskusi terarah *Focus Group Discussion* (FGD) saat pelatihan dasar pengelolaan perikanan berbasis masyarakat tradisional di Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni. Analisa yang digunakan yaitu menggunakan analisis SWOT (Rangkuti, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan

Hal paling pertama yang dilakukan dalam analisis ini adalah mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal, yang memberi pengaruh nyata dalam Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan di Kampung Sarbe, kemudian merumuskan alternatif-alternatif strategi guna memperoleh strategi yang dipilih.

1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan Dalam Upaya Penguatan Sistem Kelembagaan Adat

a. Kekuatan

- Wilayah tangkap (*fishing ground*) antara nelayan lokal dan *non*-lokal telah diatur oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA).
- Wilayah penangkapan (*fishing ground*) untuk masing-masing komoditas perikanan terintegrasi dengan sistem perizinan oleh Lembaga Masyarakat Adat.
- Nelayan *non*-lokal yang melakukan aktivitas perikanan tangkap, dibatasi jumlahnya oleh Lembaga Masyarakat Adat(LMA) agar kelestarian potensi sumberdaya perikanan tetap terjaga.
- Sebagian besar nelayan yang melakukan aktivitas perikanan tangkap masih menggunakan alat tangkap tradisional.
- Kondisi ekosistem mangrove disekitar Distrik Kuri masih baik mendukung keberadaan potensi sumberdaya ikan dan habitat biota *Endangered, Threatened, Protected* (ETP).

b. Kelemahan

- Masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan tangkap di wilayah Kampung Sarbe.

- Pengaturan pembagian wilayah tangkap (*fishing ground*) masih belum berpihak ke nelayan lokal, dimana luas *fishing ground* nelayan lokal masih kecil.
- Aksesibilitas untuk mendukung transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- Sistem pemasaran terhadap produksi perikanan tangkap (hasil laut) sulit dijangkau oleh nelayan Kampung Sarbe.

c. Peluang

- Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di Teluk Bintuni sudah dalam tahapan proses legalisasi.
- Potensi sumberdaya perikanan di Kampung Sarbe masih mudah diperoleh.
- Adanya dukungan pemerintah nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap eksistensi masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan tangkap.
- Adanya dukungan pihak swasta PT BUMWI (Bintuni Utama Murni *Wood Industries*) untuk mengembangkan SDM melalui peningkatan kapasitas.
- Komoditas perikanan utama di Teluk Bintuni merupakan produk ekspor dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

d. Ancaman

- Adanya isu perikanan tangkap yang tidak memiliki izin, baik izin pemerintah ataupun izin wilayah tangkap oleh LMA Kampung Sarbe.
- Sistem penegakan hukum yang belum maksimal terhadap peraturan penangkapan biota yang dilindungi atau diatur ukuran tangkapnya.
- Adanya potensi konflik antar nelayan lokal dan *non-lokal* dari aspek sistem perizinan *fishing ground*.
- Adanya degradasi akibat pemanfaatan pohon mangrove untuk kebutuhan industri.

2. Analisis Strategi faktor Internal dan Eksternal

a. Faktor strategi internal Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan Dalam Upaya Penguatan Sistem Kelembagaan Adat

Hasil analisis dan akumulasi pendapat dari responden untuk komponen internal dapat dilihat pada (Tabel 2).

Tabel 2. Matriks faktor-faktor strategi internal

	Faktor Strategi	Bobot	Rating	BxR	Akumulasi
Kekuatan	1. Wilayah tangkap (<i>fishing ground</i>) antara nelayan lokal dan <i>non</i> -lokal telah di atur oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA).	0.09	2	0.18	0.64
	2. Wilayah tangkap penangkapan (<i>fishing ground</i>) untuk masing-masing komoditas perikanan terintegrasi dengan sistem perizinan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA).	0.14	2	0.27	
	3. Nelayan <i>non</i> -lokal yang melakukan aktivitas perikanan tangkap, dibatasi jumlahnya oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar kelestarian potensi sumberdaya perikanan tetap terjaga.	0.14	3	0.41	
	4. Sebagian besar nelayan yang melakukan aktivitas perikanan tangkap masih menggunakan alat tangkap tradisional.	0.14	4	0.55	
	5. Kondisi ekosistem mangrove di sekitar Distrik Kuri masih baik mendukung keberadaan potensi sumberdaya ikan dan habitat biota <i>Endangered, Threatened, Protected</i> (ETP).	0.09	2	0.18	
	Total			1.59	
Kelemahan	1. Masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan tangkap di wilayah Kampung Sarbe.	0.14	-3	-0.41	
	2. Pengaturan pembagian wilayah tangkap (<i>fishing ground</i>) masih belum berpihak ke nelayan lokal, dimana luas <i>fishing ground</i> nelayan lokal masih kecil.	0.09	-2	-0.18	
	3. Aksesibilitas untuk mendukung transportasi dan komunikasi masih terbatas.	0.09	-2	-0.18	
	4. Sistem pemasaran terhadap produksi perikanan tangkap (hasil laut) sulit di jangkau oleh nelayan Kampung Sarbe.	0.09	-2	-0.18	
	Total	1.00		-0.95	

(Sumber: Analisis data primer, 2019)

Komponen kekuatan menunjukkan nilai yang cukup signifikan terhadap pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat dengan nilai +1,59, sedangkan kelemahan dalam pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat memiliki nilai -0,95, sehingga akumulasi nilai dari pengaruh faktor-faktor internal adalah 0,64. Keadaan ini menunjukkan bahwa faktor kekuatan yang dimiliki wilayah ini sangat besar, sehingga upaya dalam merumuskan strategi pengelolaan

potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe Teluk Bintuni cocok untuk diterapkan.

b. Faktor strategi eksternal Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan Dalam Upaya Penguatan Sistem Kelembagaan Adat

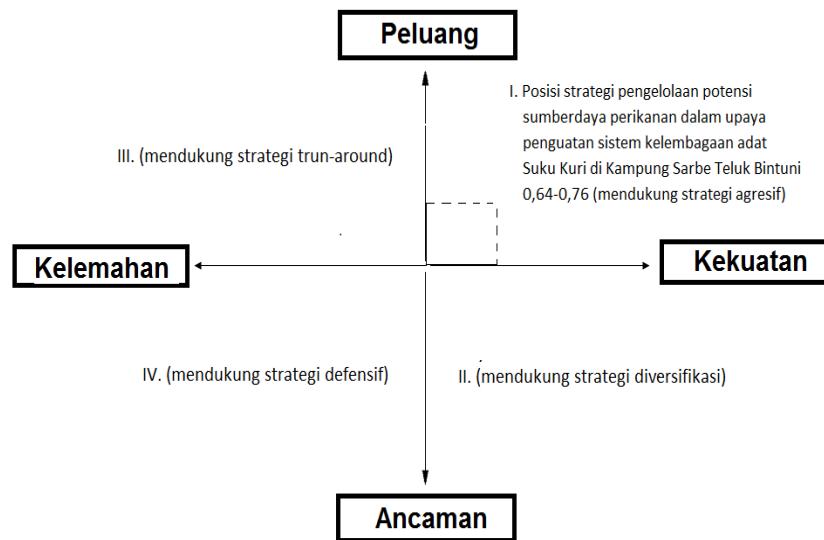
Hasil analisis dan akumulasi pendapat dari responden untuk komponen eksternal dapat dilihat pada (Tabel 3).

Tabel 3. Matriks faktor-faktor strategi eksternal

	Faktor Strategi	Bobot	Rating	BxR	Akumulasi
Peluang	1. Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di Teluk Bintuni sudah dalam tahapan proses legalisasi.	0.10	2	0.19	0.76
	2. Potensi sumberdaya perikanan di Kampung Sarbe masih mudah diperoleh.	0.10	3	0.29	
	3. Adanya dukungan pemerintah nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap eksistensi masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan tangkap.	0.10	3	0.29	
	4. Adanya dukungan pihak swasta PT BUMWI untuk mengembangkan SDM melalui peningkatan kapasitas.	0.14	3	0.43	
	5. Komoditas perikanan utama di Teluk Bintuni merupakan produk ekspor dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.	0.14	4	0.57	
	Total			1.76	
Ancaman	1. Adanya isu perikanan tangkap yang tidak memiliki izin, baik izin pemerintah ataupun izin wilayah tangkap oleh LMA Kampung Sarbe.	0.10	-2	-0.19	
	2. Sistem penegakan hukum yang belum maksimal terhadap peraturan penangkapan biota yang dilindungi atau diatur ukuran tangkapnya.	0.14	-3	-0.43	
	3. Adanya potensi konflik antar nelayan lokal dan <i>non-lokal</i> dari aspek sistem perizinan <i>fishing ground</i> .	0.10	-2	-0.19	
	4. Adanya degradasi akibat pemanfaatan pohon mangrove untuk kebutuhan industri.	0.10	-2	-0.19	
	Total	1.		-1	

(Sumber: Analisis data primer, 2019)

Matriks strategi eksternal pada (Tabel 3), menunjukkan bahwa nilai komponen peluang sebesar +1,76 dan komponen ancaman sebesar -1. Dari faktor eksternal diperoleh akumulasi sebesar 0,76, keadaan ini mengindikasikan bahwa peluang dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat lebih besar dibandingkan ancaman, setelah mendapatkan nilai akumulasi dari hasil analisis matriks SWOT, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe sudah berada pada posisi kuadran I dengan nilai 0,64 sampai dengan 0,76 seperti pada (Gambar 2).



Gambar 2. Hasil kombinasi faktor internal dan faktor eksternal

Pada (Gambar 2), diketahui bahwa faktor internal dan faktor eksternal didapatkan hasil yang berada pada kuadran I, yaitu mendukung strategi agresif. Menurut (Rangkuti, 2005) merupakan situasi yang sangat baik, dimana kondisi pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

3. Alternatif Strategi

Setelah mengetahui posisi dari hasil analisis matriks SWOT maka langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif strategi pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya

penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe. Dengan melihat pertimbangan antara kekuatan dan peluang pada pengelolaan potensi sumberdaya perikanan, memberikan strategi khusus terhadap bentuk pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe, dengan dilakukan strategi agresif-SO (Kekuatan dan Peluang) menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, faktor kekuatan terbesar dalam pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe yaitu :

1. Sebagian besar nelayan yang melakukan aktivitas perikanan tangkap masih menggunakan alat tangkap tradisional.
2. Nelayan *non-lokal* yang melakukan aktivitas perikanan tangkap, dibatasi jumlahnya oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar kelestarian potensi sumberdaya perikanan tetap terjaga.

Langkah-langkah strategi yang akan mendukung pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe yaitu :

- 1. Pengembangan wilayah pesisir dan laut Teluk Bintuni sebagai Kawasan Perlindungan dan Pelestarian yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA).**
 - a. Peningkatan kapasitas terhadap MHA untuk mengelola dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
 - b. Penyediaan payung hukum atau regulasi tentang pengelolaan perikanan berbasis masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional.
- 2. Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian potensi sumberdaya laut di wilayah Kampung Sarbe.**
 - a. Sosialisasi kepada nelayan dan *stakeholders* untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap agar berkelanjutan.
 - b. Peningkatan kapasitas terhadap masyarakat dalam upaya pengawasan secara partisipatif terhadap pemanfaatan potensi perikanan.
- 3. Perlindungan ekosistem mangrove dan pengelolaan potensi sumberdaya perikanan secara lestari.**

- a. Mendorong pemerintah dan *stakeholders* untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagai kebutuhan lokal dan menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aspek perikanan.
- b. Pembuatan peta dan *database* potensi komoditas perikanan utama yang merupakan produk ekspor yang bernilai ekonomis tinggi di Kampung Sarbe.
- c. Pengembangan regulasi tingkat desa (peraturan kampung) tentang pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

4. Mendorong terciptanya sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan.

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan yang bernilai ekonomis tinggi.
- b. Mengoptimalkan kerjasama antar nelayan dan pengepul dalam daerah dan luar daerah untuk menjamin keberlanjutan sistem pemasaran produk perikanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Komoditas hasil tangkapan utama nelayan Kampung Sarbe adalah kepiting bakau yang dalam Pemanfaatan diatur dan dikelola oleh lembaga masyarakat adat. Strategi pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dalam upaya penguatan sistem kelembagaan adat Suku Kuri di Kampung Sarbe Teluk Bintuni yaitu: pengembangan wilayah pesisir dan laut Teluk Bintuni sebagai kawasan perlindungan dan pelestarian yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian potensi sumberdaya laut di wilayah Kampung Sarbe, perlindungan ekosistem mangrove dan pengelolaan potensi sumberdaya perikanan secara lestari, mendorong terciptanya sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan.

Saran

Kontribusi pemerintah dan pemerintah daerah untuk penguatan peran kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kampung Sarbe perlu ditingkatkan, sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arebo.B.D. & Inayah. 2019. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Teluk Bintuni dalam Mengelola Perikanan Secara Berkelanjutan. <https://www.wwf.or.id/?72003/Meningkatkan-Partisipasi-Masyarakat-Teluk-Bintuni-dalam-Mengelola-Perikanan-Secara-Berkelanjutan>. di akses pada 02 Mei 2019 pada pukul 04.50 WIT.
- Arobaya, A. Y., & Pattiselanno, F. 2010. Potensi mangrove dan manfaatnya bagi kelompok etnik di Papua. *The Americas*. 49 (27); 1.
- Baransano, H. K., & Mangimbulude, J. C. 2011. Eksploitasi dan konservasi sumberdaya hayati laut dan pesisir di Indonesia. *Jurnal Biologi Papua*. 3 (1); 39-45.
- Elfemi, N. 2015. Sasi, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (Kasus; Masyarakat suku Tanimbar di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Pelangi*, 6 (1).
- Ghufran, M., & Kordi, H. 2012. *Ekosistem mangrove: potensi, fungsi dan pengelolaan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hasani, Q. 2012. Konservasi sumberdaya perikanan berbasis masyarakat, implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Aquasains*. 1 (1); 35-44.
- Irwanto. 2016. Gambaran Umum Kabupaten Teluk Bintuni. <http://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-teluk-bintuni/> di akses pada 05 Mei 2019 pada pukul 05.32 WIT.
- Kusumadinata, A. 2015. Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara). *Jurnal Sosial Humaniora*. 6 (1); 23-32.
- Lestari, E., & Satria, A. 2015. Peranan sistem sasi dalam menunjang pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 1 (2); 67-76.
- PERDA Kabupaten Teluk Bintuni NO 1 2019. Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Teluk Bintuni <http://Www.Aman.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2019/05/PERDA-PPMHA-TELUK-BINTUNI-2019.pdf> di akses pada 1 November 2019 pada pukul 4.40 WIT
- PERMEN-KP NOMOR 14 2011 Usaha Perikanan Tangkap <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-14-men-2011-ttg-usaha-perikanan-tangkap.pdf> di akses pada 28 Oktober 2019 pada pukul 2.45 WIT
- PERMEN-KP NOMOR 56 2016. Larangan Penangkapan Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/56%20PERMEN-KP%202016.pdf> di akses pada 25 Oktober 2019 pada pukul 12.38 WIT.
- Persada, N.P.R., Mangunjaya, F.M., & Tobing, I.S. 2018. Sasi sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku. *IlmudanBudaya*. 41(59).
- Rangkuti, F. 2014. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. *Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta.
- Saru, A. 2014. *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir*. Institut Pertanian Bogor Press. Bogor, 185.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, P. D. 2014. Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 291, 292.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.